

2023

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN / LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH**

LKPJ/LPPD



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



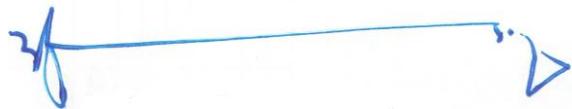
Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ/LPPD) dapat diselesaikan.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ/LPPD dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

LKPJ/LPPD Kecamatan Pelaihari secara garis besar menjabarkan mengenai Arah Kebijakan Umum SKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen. Kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Pelaihari, Januari 2024

Camat Pelaihari,



AGUS SETIYO, SSTP, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19850808 200412 1 001

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Tanah Laut dibentuk dan ditetapkan sebagai Wilayah Daswati II di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut. Dalam perkembangannya, Kabupaten Tanah Laut wilayah administrasi kecamatan menjadi 11 kecamatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup Laporan ini meliputi :

- (1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
 - (a) capaian kinerja makro,
 - (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - (c) capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - (d) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka LKPJ/LPPD yang disampaikan oleh Kepala Daerah merupakan ikhtisar/rangkuman dari LKPJ/LPPD SKPD se Kabupaten Tanah Laut termasuk Kecamatan Pelaihari. Oleh karenanya, maka LKPJ/LPPD Kecamatan Pelaihari wajib disampaikan setiap tahunnya untuk memenuhi penyusunan LKPJ/LPPD Kepala Daerah.

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (a) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Di lingkungan Kecamatan Pelaihari hanya sebagai pengelola administrasi pelaksanaan untuk dana- dana transfer dari Pusat, yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Sehingga mengenai pengelolaan pendapatan daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut hanya mengelola administrasinya saja terhadap dana-dana transfer dari Pusat serta mengelola administrasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 Tahun.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
3. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah), Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dikelola oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Hasil Pajak Daerah;
 - (2) Hasil Retribusi Daerah;
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
 - (2) Dana Alokasi Umum;
 - (3) Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:
 - (1) Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - (2) Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

- (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- (4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
- (5) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
2. Melaksanakan validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
3. Memperkuat kemampuan analisis terhadap kondisi mikro daerah, makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah.

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka

pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 30 dan Pasal 31 terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:
 - (a) Pajak daerah;
 - (b) Retribusi daerah;
 - (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, secara umum ditujukandalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhanekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2023.

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlahvital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaannya, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggarnya, sudah tentu akan semakin bertambah salahnya pada waktu pelaksanaan belanjanya, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaannya dan akan diragukan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, melalui perencanaan

penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka dalam PPAS Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan :

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional, program prioritas provinsi, RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 serta mempedomani peraturan

daerah tentang organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2022 telah ditetapkan. Atas dasar RKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengarahkan kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2023 pada prioritas pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Peningkatan kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan pelayanan public.
3. Pemantauan Insfrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan beberapa variable, tidak saja menyangkut keperluan yang sangat prioritas, mendesak atau urgent, namun juga memuat hal –halyang terkait dengan penyesuaian- penyesuaian atas rencana belanja, agar program dan kegiatan yang direncanakan pada belanja langsung dan non program melalui belanja tidak langsung, dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja operasi terdiri dari tujuh jenis belanja yaitu:
 - (1) belanja pegawai;
 - (2) belanja barang dan jasa;

- (3) belanja bunga;
 - (4) belanja subsidi;
 - (5) belanja hibah;
 - (6) belanja bantuan sosial;
- 2) Belanja Modal terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:
- (1) belanja tanah;
 - (2) belanja peralatan dan mesin;
 - (3) belanja bangunan dan gedung;
 - (4) belanja jalan;
 - (5) belanja irigasi dan jaringan;
 - (6) belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:
- (1) belanja bagi hasil;
 - (2) belanja bantuan keuangan;

1.2 VISI MISI KEPALA DAERAH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi). Kemudian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanah Laut 2018-2023 yaitu :

BERKARYA	:	Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
INOVASI	:	Diwujudkan dengan menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
TERTATA	:	Diwujudkan dengan membangun tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance)
RELIGIUS	:	Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL DAN SINERGI	:	Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Adapun yang menjadi strategi dan arah kebijakan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut terpilih menyusun 7(tujuh) program unggulan yang akan di implementasikan kepada seluruh rakyat Tanah Laut sebagai berikut :

1. Kredit Tanpa Anggungan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM, dan lain-lain sebesar 100 Milyar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memilih 7 program unggulan salah satunya adalah pada program

kredit tanpa agunan dan bunga 0% untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM dan lain lain sebesar Rp 100 Milyar. Terkait hal ini sebagai upaya salah satu di MISI ke-5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah dengan target 100 Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%. Mengingat arti penting program unggulan ini, maka langkah yang sudah ditempuh adanya naskah akademik yang menjadi Landasan bagi perumusan Peraturan Bupati Tanah Laut yang mengatur pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% sebesar Rp 100 Milyar. Dalam rangka mencapai hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan kajian akademis, baik melalui suatu kajian atau referensi akademis. Tujuan penyusunan naskah akademis ini adalah memberikan landasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipergunakan sebagai basis perumusan dan implementasi program pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%. Naskah Akademik adalah berupa Kajian Analisis atas Kebijakan Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% sebesar Rp 100 Milyar oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50 %

Untuk membangkitkan dan juga mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Ini merupakan wujud dari pemberdayaan dengan memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial seperti nilai kegotong royongan yang akhir-akhir ini sudah mulai terkikis. Salah satunya adalah dengan

peningkatan alokasi dana pembangunan desa. Pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Program unggulan ini salah satu upaya untuk memenuhi MISI 5: Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pembinaan desa. Adapun cakupan kinerja pengelolaan ADD untuk Desa Membangun pada Tahun 2019 dengan target 100 %.

3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di setiap kecamatan dialokasikan 1 Milyar

Kegiatan sosial keagamaan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi orientasi sekaligus. Dimensi dimakud adalah dimensi habbluminallah dan dimensi sosial (habbluminannas). Dimensi sosial ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial kita kepada sesama, kondisi sosial suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Perekonomian masyarakat yang lebih merata cenderung akan menciptakan suasana sosial yang lebih adem, nyaman, bahagia, kekeluargaan, rasa persaudaraan dan tentunya senang saling berbagi. Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan *even* social keagamaan dengan harapan dapat diperoleh efek positif

lain yang mengikutinya. Kegiatan ini untuk sebagai salah satu upaya menyelesaikan MISI 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya aksi sosial keagamaan. Cakupan kinerjanya program aksi keagamaan dan sosial lingkup Kecamatan dengan target 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat dialokasikannya anggaran kegiatan keagamaan dan sosial di masing-masing kecamatan. Alokasi anggaran dimaksud dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD berupa belanja hibah berupa uang yang diusulkan melalui masing-masing Kecamatan dan SKPD terkait. Alokasi anggaran dimaksud telah tertuang dalam kesepakatan KUA PPA Tahun Anggaran 2023.

4. Pelatihan Tenaga Kerja “siap kerja” minimal 500 orang
Pertahun Pada era globalisasi dan perdagangan bebas, tenaga kerja dari luar saingan dan ancaman yang dianggap cukup penting oleh tenaga-tenaga kerja lokal. Akan tetapi, di sisi lain, tenaga kerja lokal saat ini masih bisa dibilang kalah saing dengan tenaga kerja dari luar. Sebabnya banyak, mulai dari pendidikan dan pelatihan yang kurang, tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup, dan belum meratanya pembangunan. Semua itulah yang menjadi faktor hambatan kualitas tenaga kerja. Fenomena tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil inisiatif dan kreatif. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menyelesaikan MISI 1: Berkarya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Sasarannya meningkatnya kompetensipencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan target jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja sejumlah 500 jiwa.

5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter/Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis

Sebuah inovasi untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat dengan mendatangi langsung orang yang sakit di rumah. Melalui program ini, dokter/paramedis akan diterjunkan ke masyarakat untuk merawat orang yang sakit. Hal ini untuk mendukung MISI 1: Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sasarannya mningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui cakupan kinerja pelayanan kesehatan *On Call*.

Sampai saat ini masih dalam taraf persiapan perangkat-perangkat infrastrukturnya sebelum semuanya diterapkan secara menyeluruh. Kondisi ini diawali dengan pembuatan Perbup No.73 Tahun 2018, tentang pembentukan Publik Safety center 119 Tanah Laut (PSC 119 Tala) yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan pada kasus Gawat Darurat dengan Kriteria :

- Umum

Pasca Stroke, penyakit degenerative, luka diabetikum, luka pasca bedah, dan penyakit lainnya yang memenuhi unsur kegawatan tertentu;

- Khusus

Kasus kecelakaan, cedera kepala, nyeri hebat, syok dan kasus lainnya yang memenuhi unsur kegawatan tertentu.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan *On Call* dianggarkan pada APBD P Tahun 2019, antara lain seperti persiapan gedung sekretariat, pengadaan ambulan, alat komunikasi, dan alkes.

Pemenuhan SDM berupa tenaga dokter dan perawat yang mempunyai sertifikat *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS). BTCLS adalah tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi. Hal tersebut dapat juga mahir dalam penanggulangankasus kegawatdaruratan.

6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85 % Jalan Kabupaten

a. Peningkatan/Pengaspalan

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung

oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Dalam mendukung MISI 5: Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat., Tujuannya terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas.

b. Layanan Pengaduan Masyarakat

Jalan rusak dan berlubang bisa saja terjadi di seluruh Kabupaten Tanah Laut terutama jalan Kabupaten. Jalanan yang rusak dan berlubang itu dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan pengendara jalan terjatuh akibat lubang. Warga dapat berpartisipasi dalam melaporkan kondisi dan lokasi jalan mana saja yang perlu perbaikan, sehingga kecelakaan pun dapat dihindarkan.

7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa/Kelurahan Selama Masa Jabatan.

Menginap bersama masyarakat dilakukan sejak Tanggal 4 Oktober 2018 sampai berakhir masa jabatan, dengan lokasi menginap pertama kali setelah dilaksanakan pelantikan di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi ke-5 yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tujuan ke-5, yaitu upaya membina desa dan menata kota.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari kalangan paling bawah bersama seluruh kepala dinas dan pejabat lain dan upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau curhatatau aspirasinya tidak terlalu berat, langsung dapat diselesaikan dalam pertemuan, tetapi kalau persoalannya berat dan butuh pembahasan serta pertimbangan banyak pihak, maka ditampung dulu untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan bersama dinas dan instansi terkait. Selain itu juga diberikan layanan-layanan kepada masyarakat dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat maupun aparat desa.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Daerah

Kecamatan Pelaihari adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada 114,642⁰– 114,872⁰ Bujur Timur dan 3,64062⁰–3,99204⁰ Lintang Selatan dengan batas–batas wilayah sebelah utara Kecamatan Tambang Ulang, sebelah timur Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar, sebelah barat Kecamatan Takisung dan sebelah selatan Kecamatan Panyipatan. Tinggi dari permukaan laut 25meter dan memiliki luas wilayah 378,95 Km² dengan jumlah Kelurahan dan Desa adalah 5 Kelurahan dan 15 Desa.

Tabel. 1.1 Luas Daerah dan Persentase terhadap Luas Kecamatan menurut Desa di Kecamatan Pelaihari

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN (%)
1	Sungai Riam	42,33	11,17
2	Kampung Baru	32,77	8,65
3	Sumber Mulia	10,5	2,77
4	Tampang	11,5	3,04
5	Sarang Halang	11	2,9
6	Bumi Jaya	8	2,11
7	Atu-Atu	3	0,79
8	Angsau	10,5	2,77
9	Pelaihari	15	3,96
10	Karang Taruna	22	5,81
11	Telaga	23	6,07
12	Guntung Besar	6	1,58

NO	KELURAHAN/DESA	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KECAMATAN (%)
13	Panjaratan	16	4,22
14	Tungkaran	27,75	7,32
15	Panggung	39	10,29
16	Pabahanan	2,8	0,74
17	Ambungan	13,5	3,56
18	Panggung Baru	19	5,02
19	Ujung Batu	21	5,54
20	Pemuda	44,3	11,69
	Total Luas Daerah	378,95	100,00

Sumber : Pelaihari dalam Angka 2023, BPS Tanah Laut

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Pelaihari menurut Data BPS Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari Dalam Angka 2023 sebanyak 78.001 jiwa. Dimana sekitar 51 persennya adalah berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.2 Jumlah Pendudukan menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan/Desa Semester I Tahun 2022 di Kecamatan Pelaihari

NO	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sungai Riam	1.826	1.766	3.592
2	Kampung Baru	739	702	1.441
3	Sumber Mulia	890	846	1.736
4	Tampang	583	578	1.161
5	Sarang Halang	3.378	3.400	6.778
6	Bumi Jaya	1.293	1.250	2.543
7	Atu-Atu	1.674	1.669	3.343
8	Angsau	6.478	6.473	12.951
9	Pelaihari	5.600	5.539	11.139
10	Karang Taruna	5.172	5.077	10.249
11	Telaga	1.307	1.363	2.733
12	Guntung Besar	310	304	614
13	Panjaratan	544	489	1.033
14	Tungkaran	417	392	809
15	Panggung	2.870	2.802	5.672
16	Pabahanan	1.434	1.432	2.866
17	Ambungan	1.132	1.009	2.141
18	Panggung Baru	866	816	1.682
19	Ujung Batu	1.510	1.479	2.989
20	Pemuda	1.314	1.215	2.529
	JUMLAH	39.400	38.601	78.011

Sumber : Pelaihari dalam Angka 2023, BPS Tanah Laut

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tanah Laut periode 2010-2020 mencapai 1,85 %. Berdasarkan tren yang ada, apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kabupaten Tanah

Laut termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% bahkan kurang dari 1%.

Tabel.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Pelaihari, 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN 2010-2020
1	2	3	4
1	Sungai Riam	3.635	1,52
2	Kampung Baru	1.464	1,63
3	Sumber Mulia	1.730	1,83
4	Tampang	1.176	1,63
5	Sarang Halang	6.836	2,64
6	Bumi Jaya	2.572	1,60
7	Atu-Atu	3.374	2,26
8	Angsau	12.957	0,90
9	Pelaihari	11.160	0,69
10	Karang Taruna	10.572	3,73
11	Telaga	2.794	2,40
12	Guntung Besar	635	4,13
13	Panjaratan	1.035	1,06
14	Tungkaran	797	1,47
15	Panggung	5.770	2,15
16	Pabahanan	2.855	2,35
17	Ambungan	2.122	1,70
18	Panggung Baru	1.740	2,26
19	Ujung Batu	3.017	1,25
20	Pemuda	2.552	3,01
	JUMLAH	78.793	1,85

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2023

Tabel. 1.4 Distribusi Persentase Penduduk 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATANPENDUDUK (per km ²) ⁴
1	2	3	4
1	Sungai Riam	4,61	85
2	Kampung Baru	1,85	44
3	Sumber Mulia	2,23	165
4	Tampang	1,49	101
5	Sarang Halang	8,69	616
6	Bumi Jaya	3,26	318
7	Atu-Atu	4,29	1114
8	Angsau	16,60	1233
9	Pelaihari	14,28	743
10	Karang Taruna	13,14	466
11	Telaga	3,50	119
12	Guntung Besar	0,79	102
13	Panjaratan	1,32	65
14	Tungkaran	1,04	29
15	Panggung	7,27	145
16	Pabahanan	3,67	1024
17	Ambungan	2,74	159
18	Panggung Baru	2,16	89
19	Ujung Batu	3,83	142
20	Pemuda	3,24	57
	JUMLAH	100,00	206

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2023

Tabel. 1.5 Rasio Jenis Kelamin, 2022

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	PERSENTASE PENDUDUK
1	2	3
1	Sungai Riam	103
2	Kampung Baru	105
3	Sumber Mulia	105
4	Tampang	101
5	Sarang Halang	99
6	Bumi Jaya	103
7	Atu-Atu	100
8	Angsau	100
9	Pelaihari	101
10	Karang Taruna	102
11	Telaga	101
12	Guntung Besar	102
13	Panjaratan	111
14	Tungkaran	106
15	Panggung	102
16	Pabahanan	100
17	Ambungan	112
18	Panggung Baru	106
19	Ujung Batu	102
20	Pemuda	108
	JUMLAH	102

Sumber : Kecamatan Pelaihari dalam Angka 2023

1.3.4 Jumlah PNS

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

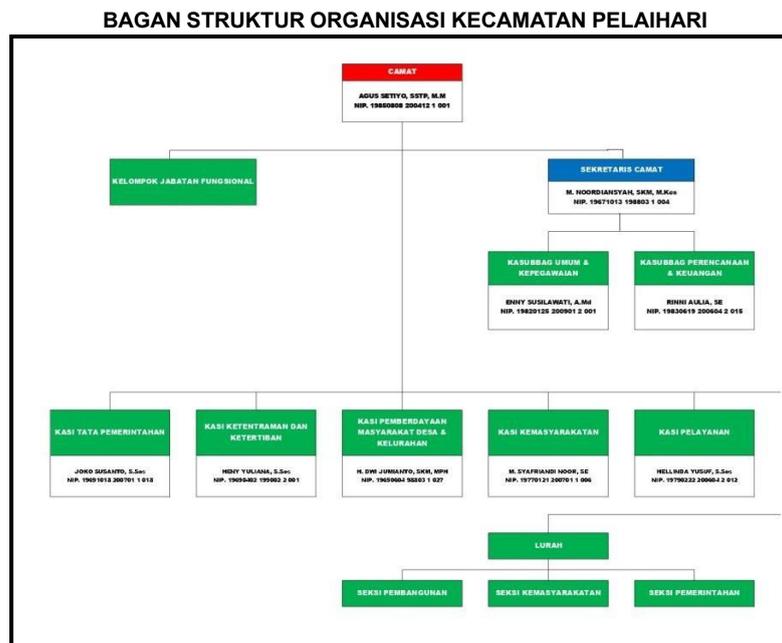
- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Pelayanan

Adapun struktur organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah

- c. Kasi Pembangunan
- d. Kasi Kemasyarakatan
- e. Kasi Pemerintahan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Sumber daya manusia di Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 berjumlah 17 orang Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah PNS Kecamatan Pelaihari dibedakan berdasarkan pangkat dan golongan, tingkat pendidikan, pejabat struktural dan penjenjangan yang ada di Kecamatan Pelaihari pada 2023 adalah :

1. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.6. Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	4
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
5	Penata Muda	III/a	2
6	Pengatur Tingkat I	II/d	-
7	Pengatur	II/c	2
Jumlah			17

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2023

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.7 PNS Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	2
2.	S1	8
3.	D3	4
4.	SMA	3
	Jumlah	17

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2023

3. Berdasarkan Pejabat Struktural

Tabel 1.8 Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2023

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
	Jumlah	9

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2023

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 1.9 Pegawai Kecamatan Pelaihari Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2023

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	2
2.	DIKLAT PIM TK.IV	5
	Jumlah	7

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari 2023

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Aset atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemberian pelayanan di Kecamatan Pelaihari terdiri dari:

1). Tanah

Tabel 1.10 Daftar Tanah Kecamatan Pelaihari

No	Uraian	Jumlah	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Kantor Kec. Pelaihari	1	2.215.400.000,00	
	Jumlah	1	2.215.400.000,00	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

2). Gedung dan Bangunan

Tabel 1.11 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Pelaihari

No	Bangunan dan Gedung	Jumlah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	2	5.639.447.218	Baik
2	Gedung Pos Jaga	1	97.954.000,00	Baik
3	Tempat Parkir	1	27.300.000,00	Baik
4	Menara Tower Air	1	7.135.000,00	
5	Bangunan Parkir Terbuka	1	281.393.000,00	Baik
6	Rumah Dinas	1	155.536.000,00	Baik
7	Pagar	1	249.069.000,00	Baik
8	Halaman Kantor	1	219.440.000,00	Baik
	Jumlah	8	6.687.663.818,00	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

3). Peralatan dan Mesin

a. Transportasi roda 4 dalam rangka operasional Camat

Mobil operasional digunakan untuk keperluan dinas Camat dalam perencanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan. Namundemikian, jumlah ini dirasakan masih kurang, sehingga sering terjadi penundaan kegiatan khususnya kegiatan dalam hal monitoring ke Desa/Kelurahan karena menunggu kendaraan yang dipakai secara bergantian.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan kerja aparatur Kecamatan Pelaihari telah pula tersedia peralatan kerja. Peralatan hasil inventarisasi BMD tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 1.12 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Pelaihari

NO	PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH BARANG	HARGA	KONDISI
1	Pompa air	2	4.900.000,00	B
2	Mini bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2	371.797.142,86	B
3	Sepeda Motor	5	101.996.382,00	B
4	Lemari besi	10	26.438.020,00	B
5	Rak Besi	3	5.220.224,00	B
6	Filling Cabinet	8	16.581.224,00	B
7	Lemari Kayu	3	4.900.000,00	B

NO	PERALATAN DAN MESIN	JUMLAH BARANG	HARGA	KONDISI
8	Rak Kayu	2	3.300.000,00	B
9	Papan Pengumuman	1	1.000.000,00	B
10	Meja Kerja Kayu	20	26.760.000,00	B
11	Meja Rapat	20	15.779.092,00	B
12	Kursi Tamu	3	10.500.000,00	B
13	Kursi Biasa	14	24.287.954,00	B
14	Bangku Tunggu	4	8.490.000,00	B
15	Sofa	4	26.759.032,00	B
16	Mesin Potong Rumput	1	16.500.000,00	B
17	Lemari Es	2	7.500.000,00	B
18	CCTV	2	13.200.000,00	RB 1
19	Papan Visual	1	6.900.000,00	B
20	AC Split	12	63.627.896,00	RB 2
21	Kipas Angin	6	3.541.666,00	B
22	Televisi	1	5.150.000,00	B
23	Loudspeker	2	16.624.000,00	B
24	Sound sistem	2	9.250.000,00	B
25	Stabilisator	1	2.350.000,00	B
26	Camera Video	1	4.750.000,00	B
27	Handy cam	1	4.150.000,00	B
28	Karpet	4	2.700.000,00	B
29	Tangga	1	3.325.000,00	B
30	Audio Mixing Stationer	1	4.897.000,00	B
31	Audio Monitor Active	1	9.279.000,00	B
32	Audio Visual	1	1.288.000,00	B
33	Microphone/Wireless Mic	1	2.319.000,00	B
34	Power Amplifier	3	15.720.000,00	B
35	Projektor	3	33.850.000,00	B
36	Alat Studio Pemetaan Lainnya	2	13.950.000,00	B
37	Genset	1	15.755.000,00	B
38	UPS	1	950.000,00	B
39	PC Unit	7	56.305.900,00	B
40	Lap top	9	75.930.000,00	RB 2
41	Printer	13	21.306.000,00	RB 2
42	Scanner	1	750.000,00	B
		182	6.687.663.818	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Pelayari Tahun 2023

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Anggaran belanja Kecamatan Pelayari pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 18.381.085.657,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.689.300.001,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,80% yang perinciannya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.14 Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	15.992.441.598	16.686.321.188	15.198.435.362	91,08
2.	Belanja Modal	1.532.840.758	1.694.764.449	1.490.864.639	87,97
	JUMLAH TOTAL	17.525.282.356	18.381.085.637	16.689.300.001	90,80

Sumber : LRA APBD 2023 Kecamatan Pelaihari

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat 2 bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Tahapan penyusunan APBD Perubahan 2023 Kecamatan Pelaihari telah melakukan penyusunan Rencana Kerja APBD Perubahan 2023 berdasarkan skala prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Tanah Laut, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2023 Kecamatan Pelaihari yaitu dengan melakukan penambahan anggaran untuk mengakomodir kegiatan yang masih belum terfasilitasi pada APBD murni tahun anggaran 2023.

Untuk tabel Rekap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan APBD Tahun Anggaran pada Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekap APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH SEBELUM	JUMLAH SESUDAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5		BELANJA DAERAH			
5	1	BELANJA OPERASI	Rp 15.992.441.598	Rp16.686.321.188	Rp. 693.879.590
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp 9.644.662.647	Rp9.764.662.647	Rp. 120.000.000
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.785.133.951	Rp 5.359.013.541	Rp. 578.879.590
5	1 05	Belanja Hibah	Rp 1.562.645.000	Rp 1.562.645.000	-
5	2	BELANJA MODAL	Rp 1.532.840.758	Rp 1.694.764.449	Rp.161.923.691
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 384.685.625	Rp 520.857.681	Rp. 136.172.056
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 487.067.272	Rp4 512.818.907	Rp. 25.751.635
5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 661.087.861	Rp 661.087.861	-
		Jumlah Belanja	Rp 17.525.282.356	Rp 18.381.085.637	Rp. 855.803.281

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 5 (lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yang telah di amanahkan sebagai pelaksanaan kinerja kepada pada pejabat pengawas dan pelaksana dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kepada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai fungsi Kewilayahan dan urusan, kami paparkan capaian anggaran pelaksanaan program tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja 2023 Kecamatan Pelaihari sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 18 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 12.210.540.081,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.148.018.413,- atau 91,30 %.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 4.877.587.878,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.335.274.368,- atau 88,88%.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 7.965.540,- dan realisasi sebesar Rp. 7.705.000,- atau 96,73 %
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan anggaran Rp.1.257.786.418,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.952.220,- atau 93,41 %
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan

anggaran Rp.27.205.720,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.350.000,- atau 85,83 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2023 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2023 pagu anggaran murni sebesar Rp 17.525.282.356,-, dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 18.381.085.637,-. Penambahan pagu anggaran sebesar Rp 855.803.281,- pada APBD Perubahan dikarenakan adanya kebutuhan belanja yang belum terakomodir pada APBD Murni serta adanya penyesuaian-penyediaan belanja. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp 16.689.300.001,- atau sebesar 90,80%. Untuk lebih jelas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran Kecamatan Pelaihari tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada lampiran 1 s.d lampiran 6.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Kecamatan Pelaihari untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas kepada masyarakat dalam pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

A. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2023 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

a) Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur, namun terkadang masih ada kendala pada organisasi kemasyarakatan maupun SKPD terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
- 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
- 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
- 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
- 5) Penggunaan dan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.
- 6) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.

b) Penatausahaan Keuangan dan Aset

- 1) Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- 2) Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

- 3) Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD.
- 4) Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- 5) Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis AkruaI dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- 6) Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- 7) Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPDterkait.
- 8) Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

B. Solusi yang akan di laksanakan :

a) Hibah dan Bantuan Sosial

1. Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar di informasikan kepada masyarakat.
2. Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial

b) Penatausahaan Keuangan dan Aset

1. Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa

diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.

2. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
3. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
4. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
7. Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan yang tercantum pada Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 tidak diberi kewenangan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah unsur kewilayahan membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan pembangunan Tahun 2023 berikut beberapa kebijakan strategis yang di ambil oleh Kecamatan Pelaihari :

Tabel 3.1 Kebijakan Startegis terhadap Permasalahan yang ada di Kecamatan Pelaihari

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pedoman Pemerintahan Kelurahan	Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kelurahan	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan di Kelurahan

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Kecamatan Pelaihari telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Rekomendasi DPRD Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Kecamatan sebagaimana fungsinya merupakan tempat pelayanan dasar bagi Masyarakat di desa terkait pelayanan pemerintahan sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Telah dimuat dalam perencanaan penganggaran berupa pengadaan kursi tunggu di pelayanan, computer, fasilitas disabilitas (kursi roda dll) AC, TV, Fasilitas pojok bermain anak, pojok konsultasi dan pojok baca	Mempermudah/memberikan kenyamanan untuk kemasyarakatan
2.	Melalui program unggulan jumlah 1 miliar per Kecamatan untuk dapat dioptimalkan serapan anggaran program hibah tersebut agar meningkatnya perputaran ekonomi di desa dan memberikan edukasi dalam penyampaian program tersebut serta pendampingan dalam proses pengusulan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban	Melakukan sosialisasi secara massif sejak tahap pengusulan proposal, penyaluran dana hibah sampai dengan pertanggung jawaban dan membangun system informasi Evaluasi Permohonan Hibah berbasis digital/online untuk mempermudah & meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan hibah Kecamatan	Lebih optimalnya penyerapan anggaran hibah 1 miliar pada Kecamatan Pelaihari
3.	Perlunya pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kecamatan mengingat beberapa ASN di Kecamatan yang akan pension dan kebanyakan SOM di kecamatan terdapat kekosongan dan tidak produktif	Membuat surat permohonan permintaan staf/ASN yang berkompeten ke BKPSDM Kabupaten Tanah Laut untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun maupun untuk ASN yang tidak produktif	Dengan adanya staf/ASN yang berkompeten akan mempermudah dan memperlancar kegiatan dan tugas pada Kecamatan Pelaihari
4.	Memaksimalkan dan melakukan inovasi dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa serta mendorong agar desa-desa bersaing untuk mendapatkan prestasi baik Tingkat Kabupaten maupun Provinsi	Mendorong peran aktif Masyarakat melalui kegiatan pembinaan Masyarakat desa maupun kelurahan	Diharapkan Masyarakat desa dan kelurahan dapat termotivasi untuk memajukan desa dan kelurahan masing-masing
5.	Mengoptimalkan dengan Upaya keterbukaan informasi public berupa inovasi improvisasi dan publikasi penyampaian pelayanan kepada Masyarakat serta menyampaikan rekapitulasi dan publikasi pada website PPID setiap bulan sebagai bahan evaluasi setiap SKPD	Segala bentuk kegiatan dan informasi public yang ada di kecamatan Pelaihari disampaikan kepada Masyarakat melalui sosial media dan website Kecamatan Pelaihari maupun pada website PPID	Keterbukaan informasi public yang ada di Kecamatan Pelaihari guna peningkatan inovasi improvisasi dan mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi pelayanan yang ada di Kecamatan

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

SKPD Kecamatan Pelaihari yang merupakan unsur kewilayahantidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari total pagu anggaran Kecamatan Pelaihari dan 5 Kelurahan sebesar Rp 18.381.085.637,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 16.689.300.001,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Satu Rupiah) atau sebesar 90,80 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Pelaihari

Pagu Anggaran sebesar Rp, 11.862.514.803,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 10.904.945.967,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 91,93%

2. Kelurahan Pelaihari

Pagu Anggaran sebesar Rp, 1.619.998.085,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 1.425,211,371,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus TujuhPuluh Satu Rupiah) atau sebesar 87,98 %.

3. Kelurahan Angsau

Pagu Anggaran sebesar Rp, 1.389.029.617,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 1.258.959.109,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Rupiah) atau sebesar 90,64%

4. Kelurahan Karang Taruna

Pagu Anggaran sebesar Rp, 1.422.711.263,-,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 1.194.509.121,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 83,96 %.

5. Kelurahan Pabahan

Pagu Anggaran sebesar Rp, 1.017.544,207,- (Satu Milyar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), dengan Realisasi Sebesar Rp. 960.218.491,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 94,37 %.

6. Kelurahan Sarang Halang

Pagu Anggaran sebesar Rp, 1.069.287.662,- (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan Realisasi sebesar Rp. 945.445.942,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 88,42 %.

5.2 KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kecamatan Pelaihari yaitu Kecamatan Pelaihari menjadi Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut di Kecamatan Kintap.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.257.573.434,00	10.531.067.845,00	100,00%	10.531.067.845,00	99,93%	9.669.023.077,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.985.000,00	3.985.000,00	100,00%	3.985.000,00	100,00%	3.925.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%	1.100.000,00	94,83%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.645.162.647,00	9.765.162.647,00	100,00%	9.765.162.647,00	100,00%	8.937.602.114,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	100,00%	9.764.662.647,00	100,00%	8.937.102.114,00	91,52%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.683.299,00	447.492.214,00	100,00%	447.492.214,00	98,27%	420.022.456,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	100,00%	7.262.410,00	100,00%	6.534.500,00	89,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	100,00%	152.254.824,00	100,00%	134.211.068,00	88,15%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	100,00%	30.806.502,00	100,00%	26.606.445,00	86,37%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	100,00%	11.451.038,00	100,00%	9.031.000,00	78,87%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	100,00%	9.967.440,00	100,00%	8.905.000,00	89,34%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	100,00%	235.000.000,00	96,70%	233.984.443,00	99,57%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.442.488,00	237.127.984,00	100,00%	237.127.984,00	100,00%	232.014.363,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	100,00%	41.050.000,00	100,00%	36.533.487,00	89,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	100,00%	196.077.984,00	100,00%	195.480.876,00	99,70%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.300.000,00	77.300.000,00	100,00%	77.300.000,00	100,00%	75.459.144,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.988.500,00	99,96%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00%	40.500.000,00	100,00%	38.670.644,00	95,48%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.489.280,00	38.489.280,00	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.489.280,00	38.489.280,00	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	77,72%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.965.540,00	7.965.540,00	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.965.540,00	7.965.540,00	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	96,73%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.276.486.418,00	1.257.786.418,00	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.276.486.418,00	1.257.786.418,00	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	100,00%	1.209.373.308,00	100,00%	1.126.931.560,00	93,18%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	100,00%	48.413.110,00	100,00%	48.020.660,00	99,19%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.205.720,00	27.205.720,00	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.205.720,00	27.205.720,00	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	100,00%	4.812.440,00	100,00%	4.575.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	100,00%	2.393.600,00	100,00%	2.140.000,00	89,41%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	100,00%	19.999.680,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		11.607.720.392	11.862.514.803	100,00%	11.862.514.803	99,93%	10.904.945.967	91,93%

Lampiran 2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kelurahan Angsau Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	305.363.740,00	380.032.016,00	#DIV/0!	380.032.016,00	#DIV/0!	322.045.759,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.650.288,00	5.323.560,00	100,00%	5.323.560,00	25,81%	1.374.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.650.288,00	5.323.560,00	100,00%	5.323.560,00	25,81%	1.374.000,00	25,81%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.999.800,00	100,00%	1.999.800,00	100,00%	1.999.800,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.999.800,00	1.999.800,00	100,00%	1.999.800,00	100,00%	1.999.800,00	100,00%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.210.653,00	53.546.881,00	100,00%	53.546.881,00	93,22%	49.916.708,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.375.182,00	15.375.182,00	100,00%	15.375.182,00	84,01%	12.916.680,00	84,01%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.904.491,00	4.904.491,00	100,00%	4.904.491,00	81,23%	3.983.800,00	81,23%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	430.980,00	430.980,00	100,00%	430.980,00	76,57%	330.000,00	76,57%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.500.000,00	32.836.228,00	100,00%	32.836.228,00	99,54%	32.686.228,00	99,54%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.794.164,00	123.269.685,00	100,00%	123.269.685,00	84,68%	104.385.900,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.794.164,00	123.269.685,00	100,00%	123.269.685,00	84,68%	104.385.900,00	84,68%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.620.835,00	162.813.590,00	100,00%	162.813.590,00	100,00%	132.497.251,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.500.530,00	40.500.530,00	100,00%	40.500.530,00	100,00%	17.881.752,00	44,15%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.120.305,00	122.313.060,00	100,00%	122.313.060,00	100,00%	114.615.499,00	93,71%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.088.000,00	33.078.500,00	100,00%	33.078.500,00	98,58%	31.872.100,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.538.000,00	29.528.500,00	100,00%	29.528.500,00	100,00%	28.792.100,00	97,51%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00%	3.550.000,00	86,76%	3.080.000,00	86,76%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.008.997.601,00	1.008.997.601,00	100,00%	1.008.997.601,00	92,86%	936.913.250,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.008.997.601,00	1.008.997.601,00	100,00%	1.008.997.601,00	92,86%	936.913.250,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.852.833,00	6.852.833,00	100,00%	6.852.833,00	82,52%	5.655.000,00	82,52%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	382.708.000,00	382.708.000,00	100,00%	382.708.000,00	88,53%	338.797.000,00	88,53%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279.743.128,00	279.743.128,00	100,00%	279.743.128,00	91,64%	256.354.750,00	91,64%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	339.693.640,00	339.693.640,00	100,00%	339.693.640,00	98,94%	336.106.500,00	98,94%
		1.314.361.341	1.389.029.617	100,00%	1.389.029.617	92,87%	1.258.959.009	90,64%

Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	308.575.378,00	422.396.107,00	100,00%	422.396.107,00	95,04%	365.780.538,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.379.063,00	2.379.063,00	100,00%	2.379.063,00	85,00%	1.643.800,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.379.063,00	2.379.063,00	100,00%	2.379.063,00	85,00%	1.643.800,00	69,09%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00%	1.675.000,00	92,00%	1.200.000,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00%	1.675.000,00	92,00%	1.200.000,00	71,64%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.199.137,00	256.330.167,00	100,00%	256.330.167,00	92,01%	214.406.336,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	584.475,00	584.475,00	100,00%	584.475,00	100,00%	577.000,00	98,72%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.340.428,00	115.631.458,00	100,00%	115.631.458,00	95,00%	100.994.940,00	87,34%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.399.179,00	6.399.179,00	100,00%	6.399.179,00	80,00%	4.357.000,00	68,09%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	2.375.055,00	2.375.055,00	100,00%	2.375.055,00	88,00%	1.910.000,00	80,42%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.500.000,00	131.340.000,00	100,00%	131.340.000,00	90,00%	106.567.396,00	81,14%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.672.183,00	137.367.827,00	100,00%	137.367.827,00	100,00%	124.554.446,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000,00	44.179.991,00	100,00%	44.179.991,00	100,00%	36.046.646,00	81,59%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.072.183,00	93.187.836,00	100,00%	93.187.836,00	100,00%	88.507.800,00	94,98%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.649.995,00	24.644.050,00	100,00%	24.644.050,00	100,00%	23.975.956,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.499.995,00	19.494.050,00	100,00%	19.494.050,00	100,00%	18.845.956,00	96,68%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.150.000,00	5.150.000,00	100,00%	5.150.000,00	100,00%	5.130.000,00	99,61%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	859.385.585,00	1.000.315.156,00	100,00%	1.000.315.156,00	100,00%	828.728.583,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	859.385.585,00	1.000.315.156,00	100,00%	1.000.315.156,00	100,00%	828.728.583,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.128.054,00	8.128.054,00	100,00%	8.128.054,00	100,00%	7.345.000,00	90,37%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	237.459.272,00	237.459.272,00	100,00%	237.459.272,00	100,00%	213.245.378,00	89,80%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	307.405.327,00	307.405.327,00	100,00%	307.405.327,00	100,00%	242.400.265,00	78,85%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	306.392.932,00	447.322.503,00	100,00%	447.322.503,00	100,00%	365.737.940,00	81,76%
		1.167.960.963	1.422.711.263	100,00%	1.422.711.263	98,53%	1.194.509.121	83,96%

Lampiran 4. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kelurahan Pabahanan Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.949.196,00	210.103.400,00	100,00%	210.103.400,00	95,46%	196.097.869,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.362.191,00	2.362.191,00	100,00%	2.362.191,00	90,00%	2.306.600,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.362.191,00	2.362.191,00	100,00%	2.362.191,00	90,00%	2.306.600,00	97,65%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.640.012,00	66.640.012,00	100,00%	66.640.012,00	86,72%	64.747.808,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	944.225,00	944.225,00	100,00%	944.225,00	100,00%	936.500,00	99,18%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.502.255,00	29.681.285,00	100,00%	29.681.285,00	90,00%	29.035.911,00	97,83%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.710.306,00	3.710.306,00	100,00%	3.710.306,00	80,00%	3.366.350,00	90,73%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.800.726,00	8.800.726,00	100,00%	8.800.726,00	95,00%	7.977.720,00	90,65%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.682.500,00	23.503.470,00	100,00%	23.503.470,00	80,00%	23.431.327,00	99,69%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.046.993,00	113.201.197,00	100,00%	113.201.197,00	100,00%	101.695.622,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.350.749,00	15.350.749,00	100,00%	15.350.749,00	100,00%	10.085.222,00	65,70%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.696.244,00	97.850.448,00	100,00%	97.850.448,00	100,00%	91.610.400,00	93,62%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00%	27.900.000,00	98,41%	27.347.839,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00%	19.000.000,00	100,00%	18.837.839,00	99,15%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00	100,00%	8.900.000,00	95,00%	8.510.000,00	95,62%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	809.463.827,00	807.440.807,00	100,00%	807.440.807,00	96,65%	764.120.622,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	809.463.827,00	807.440.807,00	100,00%	807.440.807,00	96,65%	764.120.622,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.360.062,00	6.360.062,00	100,00%	6.360.062,00	100,00%	6.043.542,00	95,02%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	402.596.000,00	402.596.000,00	100,00%	402.596.000,00	100,00%	395.253.000,00	98,18%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257.334.160,00	255.311.140,00	100,00%	255.311.140,00	95,00%	222.147.080,00	87,01%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	143.173.605,00	143.173.605,00	100,00%	143.173.605,00	90,00%	140.677.000,00	98,26%
		1.011.413.023	1.017.544.207	100,00%	1.017.544.207	96,40%	960.218.491	94,37%

Lampiran 5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kelurahan Pelaihari Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.255.986,00	441.430.892,00	100,00%	441.430.892,00	95,44%	390.066.212,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.745.829,00	2.745.829,00	100,00%	2.745.829,00	84,00%	2.292.305,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.745.829,00	2.745.829,00	100,00%	2.745.829,00	84,00%	2.292.305,00	83,48%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.097.619,00	4.281.659,00	100,00%	4.281.659,00	76,48%	3.275.000,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.097.619,00	4.281.659,00	100,00%	4.281.659,00	76,48%	3.275.000,00	76,49%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.293.413,00	140.289.924,00	100,00%	140.289.924,00	87,77%	125.889.887,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.911.266,00	4.911.266,00	100,00%	4.911.266,00	85,35%	4.192.000,00	85,35%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.580.857,00	43.009.368,00	100,00%	43.009.368,00	83,80%	36.045.544,00	83,81%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.504.190,00	5.504.190,00	100,00%	5.504.190,00	78,28%	4.309.000,00	78,29%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.797.100,00	4.797.100,00	100,00%	4.797.100,00	68,27%	3.275.000,00	68,27%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.500.000,00	82.068.000,00	100,00%	82.068.000,00	91,77%	78.068.343,00	95,13%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.064.544,00	111.064.544,00	100,00%	111.064.544,00	99,15%	93.343.100,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	47.154.185,00	47.154.185,00	100,00%	47.154.185,00	98,00%	41.160.000,00	87,29%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.910.359,00	63.910.359,00	100,00%	63.910.359,00	100,00%	52.183.100,00	81,65%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.232.331,00	150.425.086,00	100,00%	150.425.086,00	99,84%	135.138.420,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.740.000,00	25.740.000,00	100,00%	25.740.000,00	100,00%	18.398.824,00	71,48%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.372.026,00	2.372.026,00	100,00%	2.372.026,00	89,54%	2.124.000,00	89,54%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.120.305,00	122.313.060,00	100,00%	122.313.060,00	100,00%	114.615.596,00	93,71%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.822.250,00	32.623.850,00	100,00%	32.623.850,00	98,96%	30.127.500,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.172.250,00	24.973.850,00	100,00%	24.973.850,00	100,00%	22.815.500,00	91,36%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00%	7.650.000,00	95,58%	7.312.000,00	95,58%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	988.295.193,00	1.178.567.193,00	100,00%	1.178.567.193,00	87,90%	1.035.145.159,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	988.295.193,00	1.178.567.193,00	100,00%	1.178.567.193,00	87,90%	1.035.145.159,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.403.860,00	17.403.860,00	100,00%	17.403.860,00	88,46%	15.396.000,00	88,46%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	374.116.043,00	374.116.043,00	100,00%	374.116.043,00	90,00%	335.627.859,00	89,71%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	314.893.935,00	314.893.935,00	100,00%	314.893.935,00	76,77%	241.198.000,00	76,60%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	281.881.355,00	472.153.355,00	100,00%	472.153.355,00	93,65%	442.923.300,00	93,81%
		1.362.551.179	1.619.998.085	100,00%	1.619.998.085	89,96%	1.425.211.371	87,98%

Lampiran 5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kelurahan Sarang Halang Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.355.617,00	225.509.821,00	100,00%	225.509.821,00	95,05%	205.004.858,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.384.390,00	3.384.390,00	100,00%	3.384.390,00	100,00%	2.950.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.384.390,00	3.384.390,00	100,00%	3.384.390,00	100,00%	2.950.000,00	87,16%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	775.000,00	775.000,00	100,00%	775.000,00	0,00%	0,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	775.000,00	775.000,00	100,00%	775.000,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.430.755,00	48.430.755,00	100,00%	48.430.755,00	98,76%	42.252.694,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.760.583,00	2.760.583,00	100,00%	2.760.583,00	100,00%	2.327.500,00	84,31%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.067.403,00	22.067.403,00	100,00%	22.067.403,00	100,00%	19.424.000,00	88,02%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.648.703,00	12.648.703,00	100,00%	12.648.703,00	100,00%	10.801.194,00	85,39%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.954.066,00	7.954.066,00	100,00%	7.954.066,00	100,00%	6.900.000,00	86,75%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	80,00%	2.800.000,00	93,33%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.624.228,00	3.624.228,00	100,00%	3.624.228,00	100,00%	3.500.000,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.624.228,00	3.624.228,00	100,00%	3.624.228,00	100,00%	3.500.000,00	96,57%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.996.244,00	116.150.448,00	100,00%	116.150.448,00	91,58%	104.725.954,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00%	18.300.000,00	100,00%	13.122.040,00	71,71%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.696.244,00	97.850.448,00	100,00%	97.850.448,00	90,00%	91.603.914,00	93,62%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.145.000,00	53.145.000,00	100,00%	53.145.000,00	100,00%	51.576.210,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.145.000,00	46.145.000,00	100,00%	46.145.000,00	100,00%	44.576.210,00	96,60%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	843.919.841,00	843.777.841,00	100,00%	843.777.841,00	100,00%	740.451.084,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	843.919.841,00	843.777.841,00	100,00%	843.777.841,00	100,00%	740.451.084,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.499.850,00	16.499.850,00	100,00%	16.499.850,00	100,00%	12.240.000,00	74,18%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	289.931.818,00	289.931.818,00	100,00%	289.931.818,00	100,00%	237.797.794,00	82,02%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.146.520,00	163.004.520,00	100,00%	163.004.520,00	100,00%	146.195.000,00	89,69%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	374.341.653,00	374.341.653,00	100,00%	374.341.653,00	100,00%	344.218.290,00	91,95%
		1.061.275.458	1.069.287.662	100%	1.069.287.662	98,96%	945.455.942	87,49%

